

**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK
DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH
DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK”**

***“ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR TAXPAYERS IN
THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY THE DGT IN
THE TAX AUDIT PROCESS”***

TESIS

Oleh:

Rudi Sembiring Meliala

2402190016



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH DJP PADA PROSES
PEMERIKSAAN PAJAK”**

***“ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR TAXPAYERS IN THE USE OF
ARTIFICIAL INTELLIGENCE BY THE DGT IN THE TAX AUDIT
PROCESS”***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Akademik Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

Rudi Sembiring Meliala

2402190016



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Sembiring Meliala

NIM : 2402190016

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK”**:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 29 April 2026



RUDI SEMBIRING MELIALA
NIM: 2402190016



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK"

Oleh:

Nama : RUDI SEMBIRING MELIALA

NIM : 2402190016

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

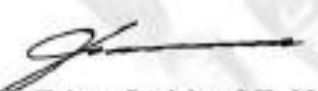
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tesis guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

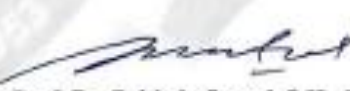
Jakarta, 29 April 2026

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 971434/7252746647130103


Asist. Prof. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dekan
Fakultas Hukum


Asist. Prof. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 191691/1237749650130143


Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NIP/NUPTK: 171443/0557759660138022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 29 April 2026 telah diselenggarakan sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Rudi Sembiring Meliala
NIM : 2402190016
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **"ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK"** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda tangan
1. Prof. Dr. Hulman Panjaitan S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Assist. Prof. Dr. <u>Paltiada</u> Saragi, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 29 April 2026



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUDI SEMBIRING MELIALA

NIM : 2402190016

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* OLEH DJP PADA PROSES PEMERIKSAAN PAJAK"

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 April 2026

RUDI SEMBIRING MELIALA
NIM: 2402190016

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP pada Proses Pemeriksaan Pajak” ini dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, termasuk penggunaan *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor pemerintahan, khususnya dalam administrasi dan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perkembangan tersebut membawa dampak positif terhadap efektivitas, efisiensi, dan akurasi proses pemeriksaan pajak, namun di sisi lain juga menimbulkan persoalan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak wajib pajak.

Penulis menyadari bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* dalam proses pemeriksaan pajak perlu dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, serta hak wajib pajak untuk memperoleh perlakuan yang adil. Dalam konteks tersebut, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi wajib pajak sebagai subjek hukum dalam sistem perpajakan nasional.

Penelitian ini berupaya mengkaji secara normatif konstruksi perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan *Artificial Intelligence* oleh Direktorat Jenderal Pajak pada proses pemeriksaan pajak. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi penggunaan teknologi tersebut terhadap hak-hak wajib pajak, prinsip *due process of law*, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan pemeriksaan pajak oleh negara.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan, doa, bantuan, serta bimbingan

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, kekuatan, dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Pimpinan dan seluruh dosen Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan selama masa studi.
3. Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.
4. Keluargaku tercinta, terima kasih telah menjadi alasan, semangat, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Assist. Prof. Dr. Paltiada Saragi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala bimbingan, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menjalani studi Magister Hukum.
6. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan penulis dalam perjalanan akademik ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pajak, perlindungan hukum wajib pajak, serta penggunaan teknologi *Artificial Intelligence* dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Jakarta, 29 April 2026

Hormat Saya

Rudi Sembiring Meliala

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
LEMBAR PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Teoritis dan Konsep	15
1. Kerangka Teoritis.....	15
2. Kerangka Konsep.....	18
F. Metode Penelitian	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Sumber Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30

5. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Penulisan	31
H. Orisinalitas Penelitian	33
1. Matriks Penelitian Terdahulu	33
2. Orisinalitas Penelitian	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	39
A. Kerangka Teori.....	39
1. Teori Perlindungan Hukum.....	39
2. Teori Kepastian Hukum	43
B. Kerangka Konsep.....	48
1. Perlindungan Hukum	48
2. Kepastian Hukum	51
3. Wajib Pajak.....	53
4. Artificial Intelligence	56
5. Direktorat Jenderal Pajak.....	58
6. Proses Pemeriksaan Pajak.....	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPASTIAN HUKUM WAJIB PAJAK DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA PEMERIKSAAN PAJAK OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	63
A. Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Administrasi dan Pemeriksaan Pajak	63
1. Perkembangan Pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Administrasi Perpajakan	63
2. Kedudukan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	67
3. Konsep dan Tujuan Pemeriksaan Pajak	74

4.	Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam Pemeriksaan Pajak....	78
5.	Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan Pajak...	82
B.	Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i>	85
1.	Prinsip Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum dalam Hukum Administrasi Negara.....	86
2.	Potensi permasalahan penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> terhadap Hak Wajib Pajak	90
3.	Analisis Kecukupan Pengaturan Hukum Dalam Menjamin Perlindungan Dan Kepastian Hukum.....	94
C.	Analisis Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> pada Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	99
3.	Keterbatasan Kerangka Regulasi Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak	99
4.	Implikasi Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> terhadap Perlindungan dan Kepastian Hukum Pajak	104
5.	Urgensi Penguatan Regulasi dan Mekanisme Pengawasan dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> pada Pemeriksaan Pajak	106
BAB IV MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ..		110
A.	Konsep Pertanggungjawaban dalam Penggunaan Teknologi Artificial Intelligence oleh Otoritas Pajak	110
1.	Prinsip Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara	110
2.	Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah pada Penggunaan Teknologi Berbasis <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pemeriksaan Pajak.....	114

B. Mekanisme Pengawasan terhadap Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pemeriksaan Pajak	118
1. Pengawasan Internal dalam Administrasi Perpajakan	118
2. Pengawasan Eksternal terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak....	122
3. Peran Mekanisme Keberatan dan Sengketa Pajak sebagai Bentuk Kontrol	126
C. Analisis Kecukupan Mekanisme Pertanggungjawaban dan Pengawasan dalam Menjamin Perlindungan Hukum Wajib Pajak.....	129
1. Potensi Risiko Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dan Keterbatasan Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Pemeriksaan Pajak	129
2. Implikasi terhadap Perlindungan dan Kepastian Hukum Wajib Pajak	134
D. Analisis Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> pada Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak.....	139
1. Keterbatasan Kerangka Regulasi Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pemeriksaan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak	139
2. Implikasi Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> terhadap Perlindungan dan Kepastian Hukum Pajak.....	143
3. Urgensi Penguatan Regulasi dan Mekanisme Pengawasan dalam Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> pada Pemeriksaan Pajak	146
BAB V PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2. Orisinalitas Penelitian	36



ABSTRAK

Judul Tesis: Analisis Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penggunaan *Artificial Intelligence* oleh DJP pada Proses Pemeriksaan Pajak

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah mendorong transformasi digital dalam administrasi perpajakan, termasuk pada proses pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penggunaan AI mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, namun juga menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum, kepastian hukum, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak serta mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis dengan penafsiran hukum serta penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam penggunaan AI pada pemeriksaan pajak masih bertumpu pada ketentuan umum hukum perpajakan dan hukum administrasi negara karena belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur penggunaan AI. Pertanggungjawaban penggunaan AI tetap berada pada pejabat pemeriksa pajak, sedangkan mekanisme pengawasan yang ada belum mampu mengakomodasi risiko seperti bias algoritma, kurangnya transparansi, dan keterbatasan akses informasi bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dalam administrasi perpajakan disertai mekanisme pertanggungjawaban, pengawasan, transparansi algoritma, dan *human oversight* untuk menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, *Artificial Intelligence*, Pemeriksaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.

ABSTRACT

Thesis Title: Analysis of Taxpayers' Legal Protection in the Use of Artificial Intelligence by the Directorate General of Taxes in the Tax Audit Process

Advances in Artificial Intelligence (AI) have driven digital transformation in tax administration, including in the tax audit process conducted by the Directorate General of Taxes (DJP). The use of AI can enhance the effectiveness and efficiency of tax audits, but it also raises legal issues related to legal protection, legal certainty, accountability, and oversight. This study aims to analyze the forms of legal protection and guarantees of legal certainty for taxpayers in the use of AI in tax audits, as well as the mechanisms for accountability and oversight.

This study is a normative legal study employing a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources obtained through a literature review and analyzed using qualitative legal analysis, legal interpretation, and deductive reasoning.

The results of the study indicate that legal protection and legal certainty for taxpayers regarding the use of AI in tax audits still rely on general provisions of tax law and administrative law, as there are currently no specific regulations governing the use of AI. Responsibility for the use of AI remains with tax auditors, while existing oversight mechanisms are not yet capable of addressing risks such as algorithmic bias, lack of transparency, and limited access to information for taxpayers. Therefore, specific regulations governing the use of AI in tax administration are needed, accompanied by mechanisms for accountability, oversight, algorithmic transparency, and human oversight to ensure legal protection and legal certainty for taxpayers.

Keywords: *Legal Protection, Legal Certainty, Artificial Intelligence, Tax Audit, Directorate General of Taxes.*